

ABSTRAK

Swedia merupakan salah satu negara yang berada di Eropa bagian utara yang sebagian besar masyarakatnya beragama Lutheran. Pernikahan sesama jenis menjadi perbincangan hangat hampir diseluruh dunia termasuk Swedia yang merupakan salah satu negara yang telah melegalkan pernikahan sesama jenis. Swedia adalah negara ketujuh yang melegalkan pernikahan sesama jenis setelah negara Norwegia. Homoseksual di Swedia tidak tabu diperbincangkan karena pada tahun 1944 pemerintah Swedia telah melegalkan homoseksual.

Latarbelakang pemerintah Swedia melegalkan pernikahan sesama jenis karena adanya tuntutan baik dari dalam negeri maupun internasional. Tuntutan yang diajukan agar pemerintah Swedia dapat melegalkan pernikahan sesama jenis yaitu adanya hak asasi manusia yang setara, adanya diskriminasi antara kaum homoseksual dengan kaum heteroseksual, dan adanya perbedaan *domestic partnership* dengan pernikahan. Karena adanya perbedaan-perbedaan itulah maka kaum homoseksual mengajukan tuntutan kepada pemerintah melalui organisasi LGBT yaitu RFSL (*The Swedish Federation For Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights*), HOMO (*The Swedish Ombudsman Against Discrimination on Grounds of Sexual Orientation*), ILGA (*International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association*).

Tetapi tuntutan tidak akan menjadi isu politik apabila tidak adanya dukungan dari individu atau organisasi yang mempunyai pengaruh besar terhadap kebijakan pemerintah. Dukungan yang diberikan baik dalam negeri negara Swedia itu sendiri maupun internasional. Dukungan yang berasal dari dalam negeri yaitu dukungan dari partai-partai politik di dalam parlemen Swedia; dukungan dari Gereja Lutheran (sebagian besar masyarakat Swedia beragama Lutheran dan gereja Lutheran mempunyai undang-undang yang memperbolehkan pasangan homoseksual melakukan pernikahan di dalam Gereja sama seperti pasangan heteroseksual); kelompok kepentingan lain seperti SRHR (*Sexual, Reproductive, Health and Rights*). Di level internasional komite hak asasi manusia PBB (*Human Rights Committee*) dan negara Belanda juga berkontribusi terhadap mempengaruhi kebijakan pemerintah Swedia.

Kata kunci : Swedia, homoseksual, legalisasi pernikahan sesama jenis, hak asasi manusia